

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Solok Selatan pada periode 2020–2024. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa aktivitas pertambangan ilegal tidak hanya menimbulkan persoalan hukum dan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyebabkan pelanggaran terhadap berbagai hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pelanggaran tersebut terjadi karena aktivitas pertambangan ilegal berlangsung secara terus-menerus dan menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat di wilayah penelitian.

Aktivitas pertambangan yang dilakukan menggunakan ekskavator di wilayah bukit dan penyedotan material di aliran sungai menyebabkan perubahan besar terhadap kondisi alam dan kehidupan sosial masyarakat di sekitar wilayah tambang. Aktivitas tersebut berkembang tidak lagi sebagai kegiatan masyarakat secara sederhana, tetapi telah membentuk hubungan sosial dan kepentingan yang kompleks antara berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.

Pelanggaran hak atas hidup terlihat dari munculnya ancaman terhadap keselamatan masyarakat akibat perubahan kondisi lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Penggalian tanah menggunakan alat berat menyebabkan wilayah bukit mengalami perubahan bentuk, sementara aktivitas pertambangan di sungai mengakibatkan perubahan aliran air dan meningkatnya kekeruhan sungai.

Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang hidup dalam kekhawatiran terhadap kemungkinan longsor, banjir, maupun risiko lain yang dapat mengancam keselamatan mereka. Rasa khawatir tersebut semakin meningkat ketika musim hujan datang karena masyarakat melihat kondisi tanah dan wilayah sekitar sudah tidak lagi stabil seperti sebelumnya. Situasi ini menunjukkan bahwa hak atas hidup tidak hanya berkaitan dengan keberadaan manusia secara fisik, tetapi juga mencakup kondisi lingkungan yang aman dan mendukung keberlangsungan hidup masyarakat.

Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan juga mengalami pengaruh akibat aktivitas pertambangan tanpa izin. Kehidupan keluarga masyarakat mengalami perubahan karena munculnya perbedaan pandangan mengenai keberadaan tambang. Sebagian masyarakat mendukung aktivitas tambang karena dianggap mampu membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan menjadi sumber penghasilan yang cepat. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat merasa kehidupan keluarga mereka menjadi tidak nyaman akibat perubahan lingkungan sosial, meningkatnya konflik di tengah masyarakat, serta munculnya ketidakpastian terhadap kondisi kehidupan ke depan. Hubungan sosial dalam keluarga dan masyarakat mengalami perubahan karena aktivitas pertambangan menciptakan perbedaan kepentingan di tengah kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pada hak mengembangkan diri, aktivitas pertambangan tanpa izin mempengaruhi pola kehidupan dan orientasi masyarakat, terutama generasi muda. Sebagian masyarakat mulai lebih tertarik bekerja di tambang dibandingkan melanjutkan pendidikan ataupun mengembangkan kemampuan lain di luar sektor

pertambangan. Aktivitas tambang dianggap memberikan hasil yang lebih cepat dibandingkan pendidikan atau pekerjaan lainnya. Keadaan tersebut menyebabkan ruang pengembangan diri masyarakat menjadi semakin terbatas karena kehidupan masyarakat mulai terpusat pada aktivitas pertambangan. Selain itu, perubahan pola pikir ini juga mempengaruhi cara masyarakat memandang masa depan dan pilihan hidup mereka.

Hak memperoleh keadilan menjadi salah satu hak yang banyak dipersoalkan masyarakat. Masyarakat melihat bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin tetap berlangsung meskipun terdapat aturan yang melarang aktivitas tersebut. Kondisi ini menimbulkan pandangan bahwa hukum belum berjalan secara maksimal dalam memberikan perlindungan dan kepastian kepada masyarakat. Sebagian masyarakat merasa bahwa keberadaan aturan belum sepenuhnya diikuti dengan tindakan nyata yang mampu menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin. Situasi tersebut memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan hukum karena masyarakat masih melihat aktivitas pertambangan berlangsung secara terbuka di beberapa wilayah.

Hak atas kebebasan pribadi juga mengalami pengaruh akibat situasi sosial yang berkembang di sekitar wilayah tambang. Sebagian masyarakat merasa tidak nyaman menyampaikan pendapat atau penolakan terhadap aktivitas tambang karena adanya tekanan sosial dan hubungan kepentingan di lingkungan sekitar. Kebebasan masyarakat dalam menentukan sikap menjadi terbatas karena keberadaan tambang telah mempengaruhi hubungan sosial antar masyarakat. Selain itu, kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan hidup juga mengalami

perubahan karena dominasi aktivitas pertambangan membuat sebagian masyarakat merasa tidak memiliki banyak pilihan pekerjaan di luar aktivitas tambang tersebut.

Hak atas rasa aman masyarakat juga mengalami gangguan akibat keberadaan aktivitas pertambangan tanpa izin. Masyarakat hidup dalam kekhawatiran terhadap kemungkinan konflik sosial, keberadaan alat berat, potensi bencana, serta ketidakpastian situasi di sekitar wilayah tambang. Aktivitas pertambangan yang berlangsung terus-menerus menyebabkan masyarakat merasa tidak sepenuhnya hidup dalam kondisi yang tenang. Selain itu, beberapa peristiwa yang berkaitan dengan konflik di sekitar aktivitas pertambangan semakin memperkuat rasa tidak aman yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Hak atas kesejahteraan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh kualitas kehidupan yang layak dan manusiawi. Aktivitas pertambangan tanpa izin mempengaruhi kenyamanan hidup masyarakat, kondisi sosial, serta kualitas lingkungan tempat tinggal mereka. Kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia menjadi pihak yang ikut merasakan dampak dari perubahan kehidupan sosial tersebut. Masyarakat tidak hanya membutuhkan penghasilan, tetapi juga membutuhkan kondisi hidup yang aman, nyaman, dan mendukung keberlangsungan kehidupan mereka secara layak.

Hak anak menjadi salah satu bagian yang paling rentan terdampak akibat aktivitas pertambangan tanpa izin. Anak-anak yang hidup di sekitar wilayah tambang mengalami perubahan lingkungan sosial yang cukup besar. Mereka

tumbuh dalam situasi di mana aktivitas pertambangan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebagian anak menjadi lebih dekat dengan aktivitas tambang dibandingkan dengan kegiatan pendidikan dan pengembangan diri lainnya. Selain itu, perhatian terhadap pendidikan anak juga mengalami pengaruh karena kehidupan masyarakat lebih banyak berpusat pada aktivitas pertambangan. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak anak belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara baik.

Analisis menggunakan pendekatan *State Obligations* menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban negara dalam menghormati (*obligation to respect*), memenuhi (*obligation to fulfil*), dan melindungi (*obligation to protect*) hak asasi manusia masyarakat belum berjalan secara optimal. Pada aspek *obligation to respect*, negara belum mampu mencegah berulangnya pelanggaran terhadap hak atas hidup, hak memperoleh keadilan, dan hak atas rasa aman. Pada aspek *obligation to fulfil*, negara belum sepenuhnya menghadirkan kebijakan yang mampu memulihkan kehidupan keluarga korban, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan masyarakat untuk mengembangkan diri, serta menjamin terpenuhinya hak anak. Sementara itu, pada aspek *obligation to protect*, negara belum mampu memberikan perlindungan yang efektif kepada masyarakat dari berbagai dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan ilegal melalui pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang terdampak.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia akibat aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Solok Selatan tidak hanya disebabkan oleh tindakan pelaku pertambangan ilegal sebagai aktor non-negara, tetapi juga dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab negara sebagai pemegang kewajiban utama dalam pemenuhan hak asasi manusia. Penyelesaian persoalan pertambangan ilegal memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada penguatan pelaksanaan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh sehingga masyarakat dapat memperoleh perlindungan serta pemulihan hak-haknya secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai kontribusi akademik maupun praktis dalam memahami persoalan pertambangan emas tanpa izin dan pelanggaran hak asasi manusia di Kabupaten Solok Selatan. Pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin secara lebih berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara. Pengawasan tersebut perlu dilakukan melalui koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, aparat penegak hukum, pemerintah nagari, serta pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan dalam penanganan aktivitas pertambangan tanpa izin. Kehadiran negara perlu benar-benar dirasakan masyarakat melalui tindakan

yang konsisten sehingga masyarakat memperoleh kepastian terhadap penanganan persoalan pertambangan di wilayah mereka.

Kedua, aparat penegak hukum dan instansi terkait perlu menjalankan penegakan hukum secara lebih konsisten terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin. Penegakan hukum tidak hanya penting untuk menjaga keberadaan aturan, tetapi juga untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menghadirkan langkah-langkah yang mampu memperkuat kehidupan sosial masyarakat di luar aktivitas pertambangan agar masyarakat tidak terus bergantung pada aktivitas tambang sebagai satu-satunya pilihan kehidupan.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan terutama dalam ruang lingkup pembahasan yang lebih banyak berfokus pada pelanggaran hak asasi manusia akibat pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Solok Selatan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pembahasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pertambangan ilegal, kebijakan negara, konflik sosial, maupun dampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat dan generasi muda di wilayah terdampak tambang.

Keempat, penelitian mengenai pertambangan emas tanpa izin dan hak asasi manusia diharapkan dapat terus dikembangkan melalui pendekatan yang lebih luas, baik secara hukum, sosial, politik, maupun lingkungan. Kajian yang lebih mendalam mengenai keterlibatan aktor negara dan aktor non-negara dalam aktivitas pertambangan tanpa izin juga penting dilakukan agar dapat memberikan

pemahaman yang lebih komprehensif terhadap persoalan pertambangan ilegal di Indonesia.

